



Rencana Pertumbuhan Hijau/GGP dalam kerangka inisiatif tata kelola Perizinan

M.C. Wattimena

Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Indonesia



yayasan inisiatif
dagang hijau

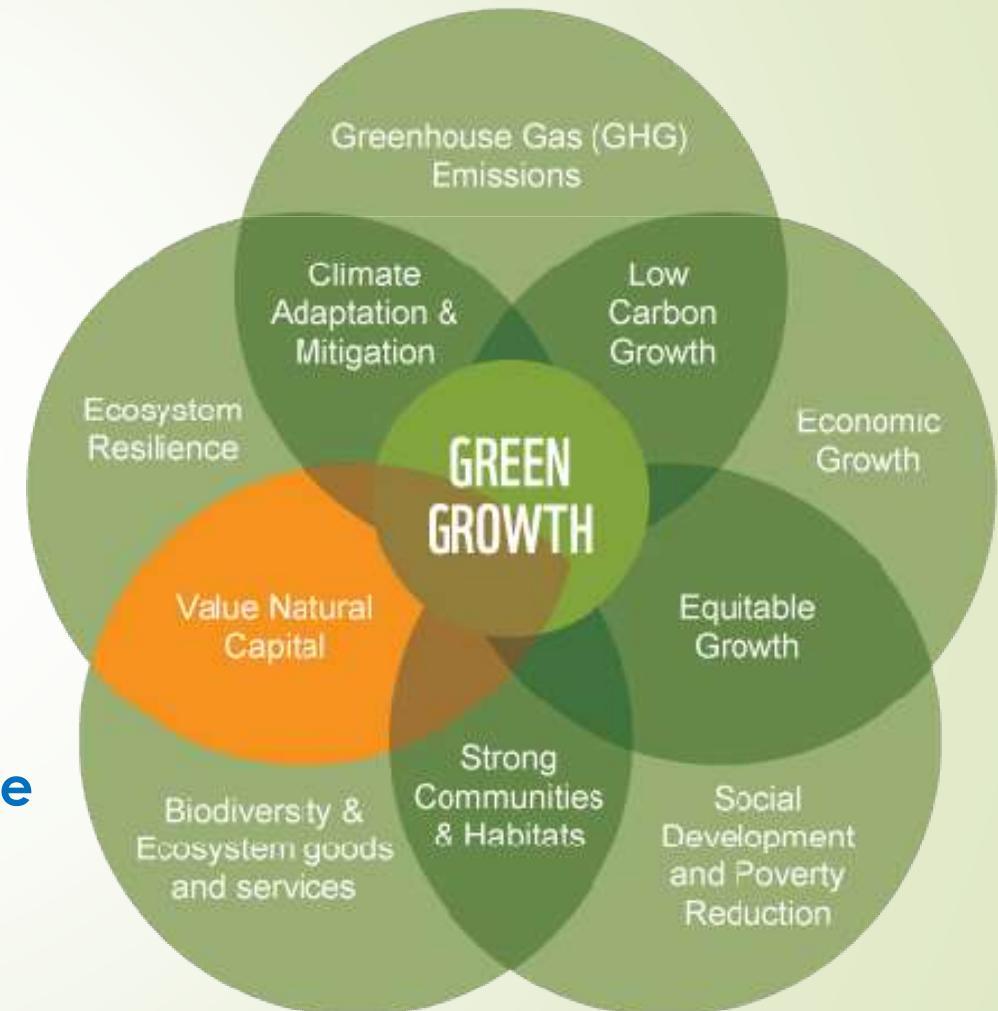


POSISI YAYASAN IDH

“Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) merupakan institusi nirlaba yang mendukung :

- ▶ Rencana pertumbuhan hijau di Indonesia, guna memperluas akses pasar komoditas Indonesia ke dunia internasional lewat praktik pertanian, dagang dan manajemen yang berkelanjutan.
- ▶ Rencana pertumbuhan hijau ini dibangun melalui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendekatan lanskap dan komoditas berkelanjutan yang sejalan dengan **UN Sustainable Development Goals (SDGs)** dan komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Perjanjian Paris.

.”



Upaya kami



Kopi

2. Sumsel/ Jambi; 8. Lampung; 9. Jabar; 10. Jatim; **±54.000 ha**; **831** kg/ha (>741 rata2 nasional); Kurikulum nasional, budidaya yang baik, pembiayaan inovatif, akses ke pasar, mendukung **SCOPI**



Kelapa Sawit

2. Sumsel/ Jambi; 4. Sumut; 5. Riau; 6. Sabah; 7. Eropa (ESPO); **41.555** ha; **11.425** petani; Pemetaaan, traceability, legalitas, kelembagaan petani, budidaya baik, sertifikasi



Kakao

13. Sulawesi;
Mendukung **CSP** (Cocoa Sustainability Partnership)



Lanskap

1. Aceh;
2. Sumsel/
Jambi;
3. Kalbar;

Rencana Pertumbuhan Hijau,

30
perusahaan, p
engelahan hutan,
KEE, P
compacts, VSA



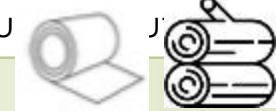
Budidaya Ikan

1. Aceh; 3. Kalbar;
10.000 petambak, pembiayaan inovatif

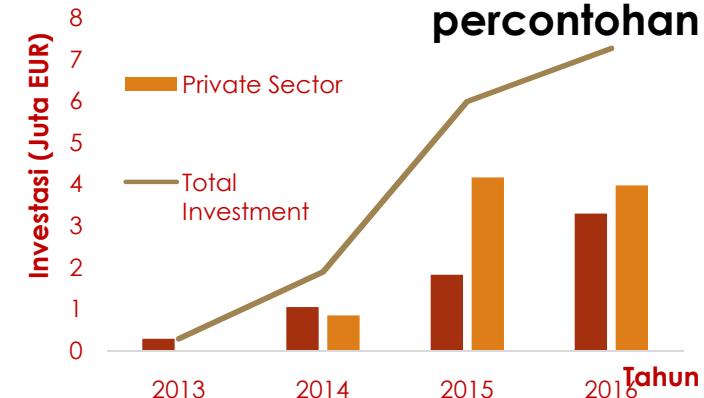


Kehutanan:

2. Sumsel/ Jambi;
3, 11, 12. Kalimantan;
2,1 juta ha (FSC); **1,66** juta ha (proses);
Sertifikasi, produktivitas, perlindu



Pendanaan untuk percontohan

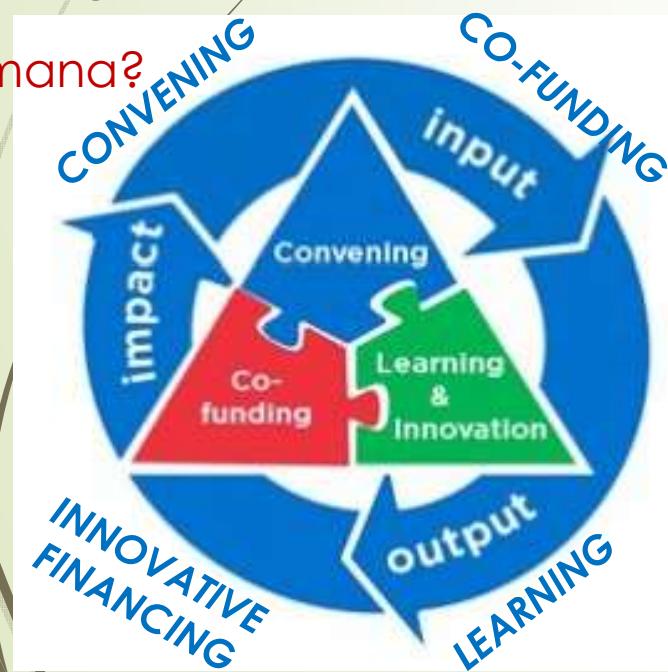


Pendekatan & dampak

Kenapa?

Kami percaya bahwa **produksi dan perdagangan yang berkelanjutan** dapat mengubah pasar dan investasi sehingga bermanfaat lebih bagi masyarakat dan bumi.

Bagaimana?



TEMA DAMPAK



Petani/
Masyarakat



Deforestasi



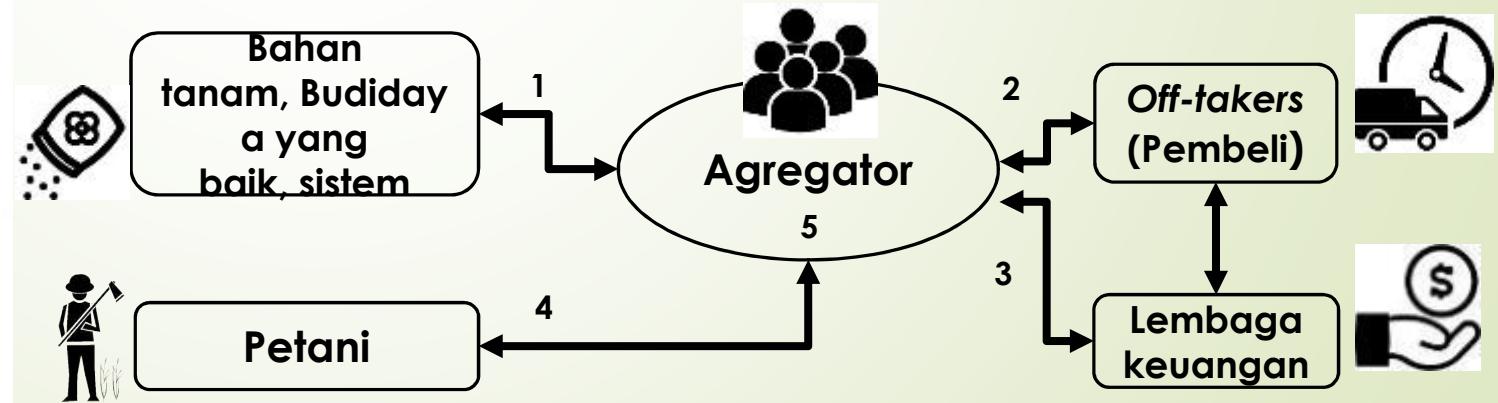
Upah layak



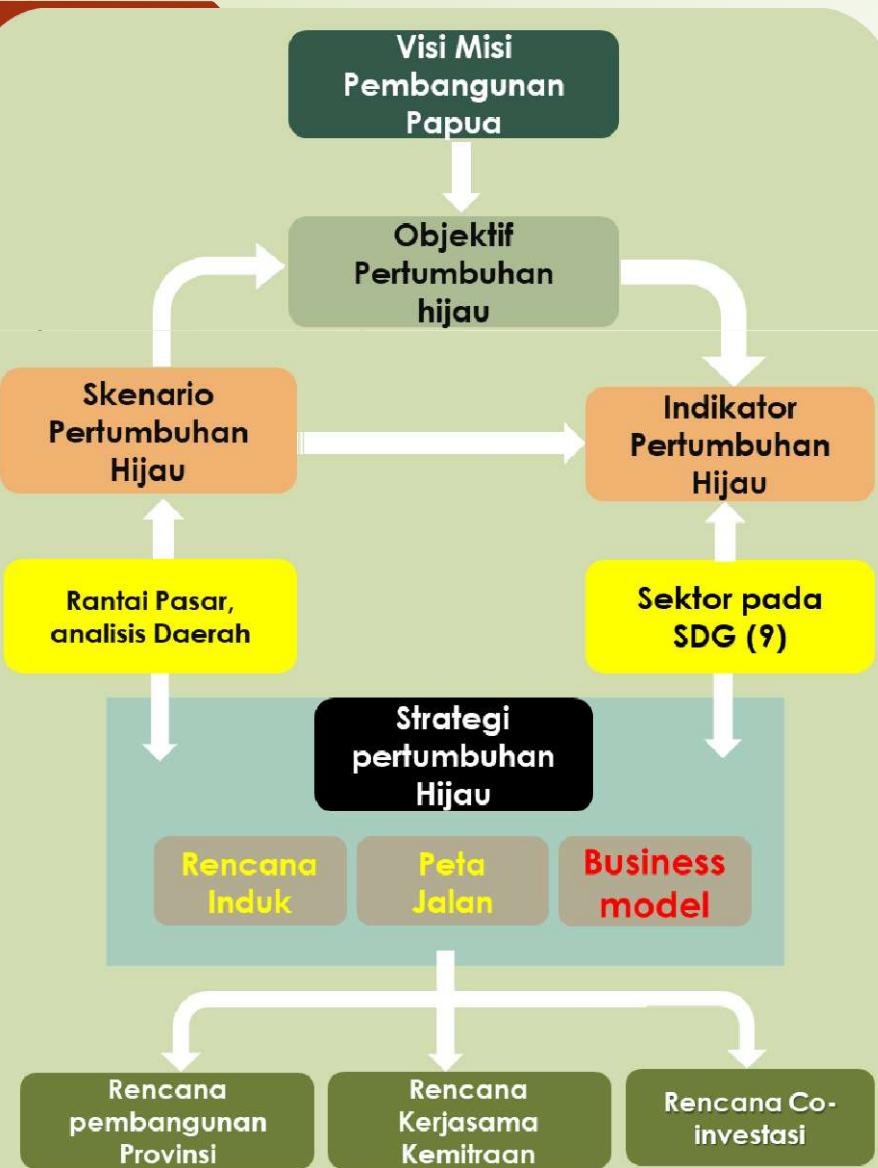
Agrokimiawi



Gender



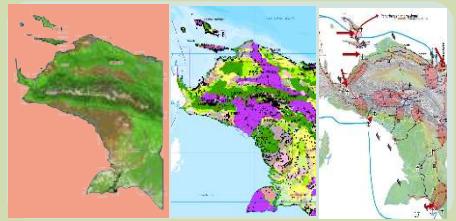
Proses pertumbuhan Ekonomi Hijau



- Penjabaran Visi (2100) dan misi (5) pembangunan Papua
- Hasil berupa rencana induk, peta jalan dan **model business**
- Pengarusutamaan pertumbuhan Hijau pada rencana pembangunan, Rencana Kerjasama Kemitraan dan **Rencana Investasi**



STRATEGI INDIKASI PERTUMBUHAN HIJAU



1

Pemanfaatan dan alokasi ruang that are compliant, effective and fair in designating protection, conservation, production and restoration areas while addressing customary rights and needs and considering biophysical factors, for sustainable and equitable growth



2

Pembangunan desa terpadu dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan through increased human livelihood capitals, wellbeing and resilience, based on the socio-cultural, ecological and economical context, infrastructure and connectivity



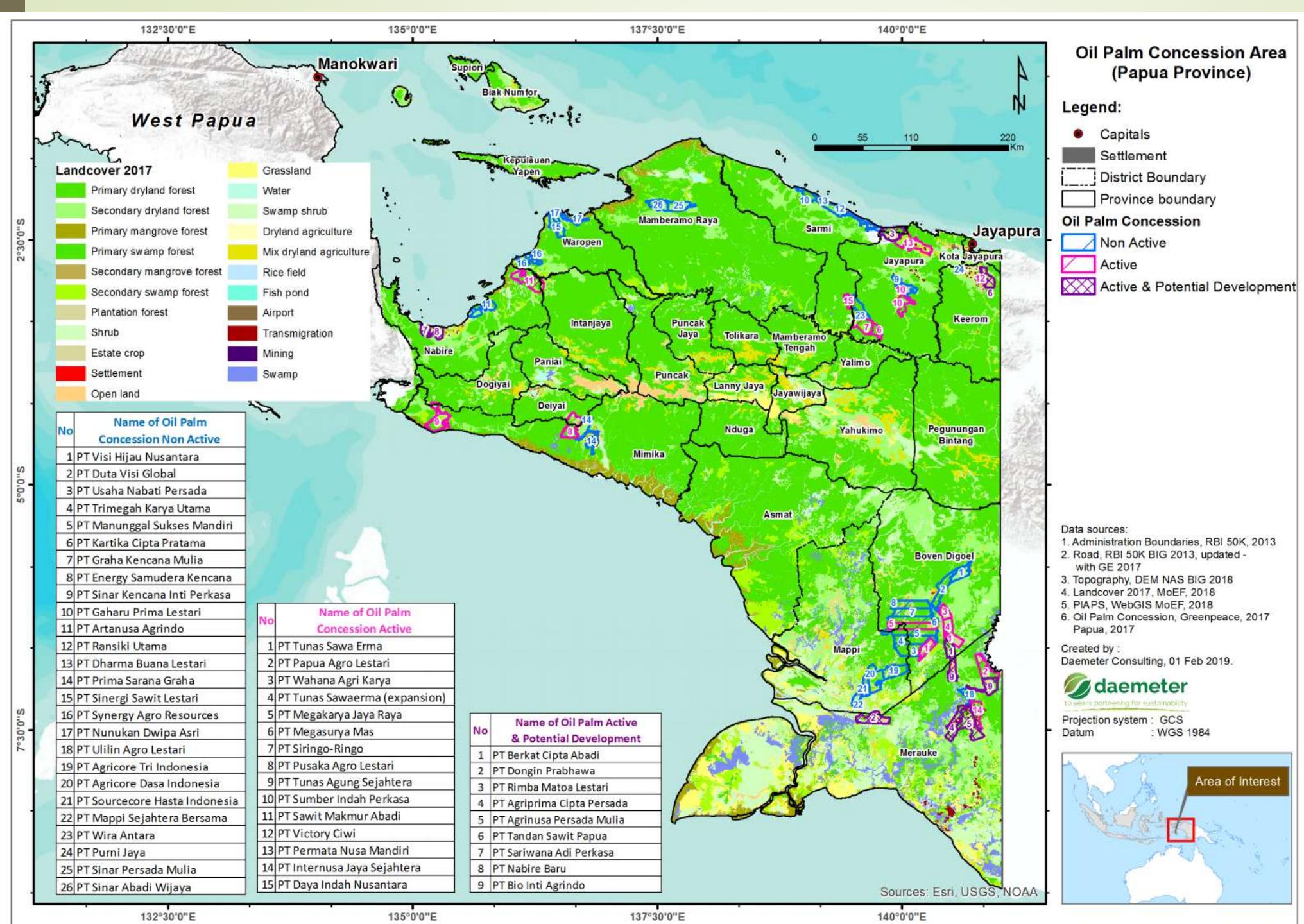
3

Rantai nilai komoditas yang kuat dan berkelanjutan that integrate production, post-harvest processing, distribution and service delivery systems in and effective commodity upstream-downstream strategies in accordance with local context and knowledge



4

Pendanaan inovatif dan mekanisme insentif jasa ekosistem based on types and quality of services produced by Papua ecosystems and biodiversity and natural habitat preserved in Papua



- Mewujudkan ambisi 70 % tutupan hutan
- Perizinan di kawasan hutan
- Memaksimalkan hasil pembangunan di lahan produktif
- Strategi pembangunan berkelanjutan di Lanskap Tutupan Hutan Tinggi



Tujuan Pencapaian Cetak Biru dan Peta Jalan Investasi Hijau /Green Investment Blue Print(GIBP)

1. Memetakan situasi terkini dari sektor pertanian dan perairan, termasuk peluang dan tantangannya
2. Mengidentifikasi peluang di masa depan terkait rantai pasok berkelanjutan dan profitabel yang melibatkan petani dan nelayan hingga konsumen lokal, nasional dan internasional
3. Mengidentifikasi pandangan perusahaan swasta mengenai resiko investasi dalam pertanian skala komersial
4. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, pengaturan logistik, serta system pendukung lainnya
5. Mengembangkan keunggulan reputasi bagi perusahaan yang mendukung investasi hijau dalam pengelolaan dan konservasi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan nilai-nilai budaya
6. Mengembangkan sistem bagi perusahaan agar dapat menerima hak kredit karbon dari pengelolaan hutan
7. Memetakan dinamika sosial kelompok, kaitannya dengan pengelolaan lahan serta hilangnya penghidupan bagi kelompok masyarakat adat.

Fase Cetak Biru dan Peta Jalan Investasi Hijau :

- ▶ Fase I: pengembangan prototipe dari beberapa komoditas terpilih, terkait dengan Rencana Pertumbuhan Hijau provinsi Papua dan Papua Barat (2019 – 2021)
- ▶ Fase II: pengembangan komoditas yang paling matang, dengan mempertimbangkan dampak dinamika sosial terkait (2022 – selanjutnya)

Rencana Aksi ke Depan:

- ▶ memetakan rantai pasok eksisting dan potensial, serta mengembangkan model-model alternatif bagi investasi hijau yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.
- ▶ mengembangkan Cetak Biru dan Peta Jalan di Papua dan Papua Barat.
- ▶ Menjalankan serangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk mendapatkan komitmen swasta untuk investasi pada komoditas eksisting dan baru di Papua dan Papua Barat.
- ▶ Menjalankan serangkaian konsultasi publik untuk mendapatkan masukan serta membangun kepemilikan atas Cetak Biru dan Peta Jalan Investasi Hijau dari pemegang kepentingan di Papua dan Papua Barat.

Peluang dan Tantangan

1. Ada ketertarikan dari pelaku usaha dan rantai pasok dunia (diwakili oleh International Chamber of Commerce) dan nasional untuk menjajagi Papua sebagai lumbung pasokan komoditas yang berkelanjutan.
2. YIDH karenanya mendukung kedua Provinsi mengembangkan Cetak Biru Investasi Hijau serta Peta Jalannya sehingga cocok dengan keinginan kedua Provinsi, masyarakat Papua dan ketertarikan swasta tersebut.
3. Beberapa rantai pasok dan rantai nilai sudah diidentifikasi seperti kakao (cokelat), kopi, rempah, perikanan dsb.
4. Tantangan tentunya masih banyak dan harus diatasi seperti mekanisme pendukung (yaitu SDM, logistik tata pemerintahan, **tata kelola perizinan**)
5. Aspek keberlanjutan yang penting adalah perlindungan hutan, menjaga kearifan serta keikutsertaan masyarakat asli Papua.

Kaitannya dengan Tata kelola Perizinan

1. Tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perizinan perlu dibenahi sehingga terjadi kejelasan hukum dan pengurangan konflik
2. Kemudahan proses perizinan bila investasi yang masuk adalah investasi hijau (yang berdampak terhadap pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua)

Sekian...